



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BANJARSARI
TERHADAP TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK
PADA PILKADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
pada Program Studi Ilmu Politik**

**Disusun Oleh :
Rizqi Aziza Sari
3312412073**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik Pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015” ini telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing untuk di ajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juli 2019

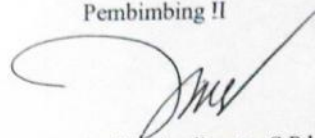
Menyetujui,

Pembimbing I



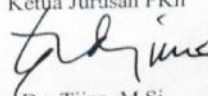
Martien Hema Susanti, S.Sos.,M.Si.
NIP. 197303312005012001

Pembimbing II



Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197610112006041002

Mengesahkan
Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

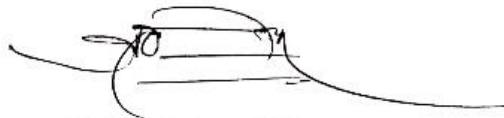
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **1 Agustus 2019**

Penguji I



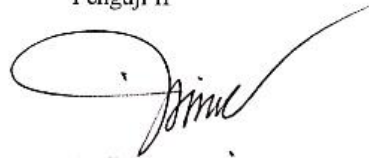
Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Penguji II



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197303312005012001

Penguji II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Mengerahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang



Dr. **MNES** Chatol Mustofa, MA.
196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, pendapat, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2019



Rizqi Aziza Sari
NIM. 3312412073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“What you react to in others, you strengthen in yourself”
(Eckhart Tolle)

“Konfirmasi sebelum berasumsi, karena akan menghasilkan persepsi yang bisa mempengaruhi emosi dan akhirnya ke aksi”
(*anonymous*)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan
terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan
2. Kawan-kawan di Progam Studi Ilmu Politik
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

SARI

Sari, Rizqi Aziza. 2019, *Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si. dan Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. 101h

Kata Kunci :Persepsi, Pilkada, Dinasti Politik

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ada salah satu persyaratan untuk calon kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota) tidak mempunyai ikatan keluarga dengan *incumbent* seperti yang disampaikan dalam pasal 7 huruf (r) disebutkan bahwa *tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*. Jika diamati dengan seksama, maka pasal ini merupakan upaya untuk mencegah timbulnya dinasti-dinasti politik di daerah.

Terpilihnya H. Asip Kholbihi SH., M.Si dan Ir. Hj. Arini Harimurti pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015 memunculkan persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik. Persepsi ini dapat diketahui melalui beberapa indikator. *Pertama*, pengetahuan tentang pilkada yang berkaitan dengan nama pasangan calon, visi misi serta partai pendukung didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 70,66%. *Kedua*, pengetahuan tentang dinasti politik yang dipahami sebagai kekuasaan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 73,20%. *Ketiga*, dampak dinasti politik berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menurun karena rawan penyalahgunaan kekuasaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 77,18%. *Keempat*, orientasi pemilih cenderung memilih kandidat yang mempunyai sifat dan sikap baik, program kerja bagus, persamaan ideologi, pengalaman dalam bidang pemerintahan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 70,08%. *Kelima*, elit politik memiliki posisi penting diberbagai sektor kehidupan dan kepentingan untuk mengendalikan kekuasaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 74,16%. *Keenam*, jaringan sosial dapat digunakan untuk menjaring dukungan kepada kandidat didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 77,11%. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu adanya objek yang dipersepsi, pengetahuan tentang dinasti politik yang dapat diperoleh melalui alat indera, dan perhatian atau cara pandang masyarakat Desa Banjarsari atas terpilihnya Ir. Hj. Arini Harimurti sebagai wakil bupati.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini hendaknya masyarakat melihat dan mencermati kandidat dalam kompetisi pilkada untuk lebih mengenal calon bupati dan wakil bupati sehingga dapat menentukan kriteria pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi Strata Satu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Drs.Tijan, M.Si.,Ketua Jurusan Politik dan kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perizinan pelaksanaan penelitian.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si., sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.

5. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Dr. Eko Handoyo, M.Si sebagai dosen penguji yang telah menguji dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta staf Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perizinan pelaksanaan penelitian.
8. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala kepercayaan, kasih sayang, dukungan, materi serta do'a yang tidak pernah putus.
9. Teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2012 yang senantiasa memberi dukungan dan membantu pelaksanaan penelitian.
10. Semua pihak terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pendidikan pada khususnya.

Semarang, Juli 2019



Rizqi Aziza Sari
NIM. 3312412073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	12
A. Deskripsi Teoretis	12
1. Persepsi.....	12
a. Pengertian Persepsi.....	12
b. Proses Terjadinya Persepsi	14
c. Faktor-faktor yang memengaruhi Persepsi.....	17
2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	19

a.	Pengertian	19
b.	Pilkada Langsung	20
3.	Dinasti Politik.....	28
a.	Pendekatan Elit dalam Memahami Dinasti Politik.....	30
b.	Faktor-faktor terbentuknya Dinasti Politik.....	32
4.	Perilaku Pemilih	35
a.	Partisipasi Politik.....	35
b.	Orientasi Politik.....	35
c.	Definisi Perilaku Pemilih.....	36
d.	Postulat Hukum Perilaku Pemilih.....	37
e.	Pendekatan-pendekatan Perilaku Pemilih	39
f.	Orientasi Pemilih	41
g.	Jenis-jenis Pemilih.....	43
B.	Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan	46
1.	Membangun Dinasti Politik melalui Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo.....	46
2.	Pelanggaran Dinasti Politik “Samawi” Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul tahun 2010	47
3.	Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah	48
4.	Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015	49
5.	Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia	51
6.	Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia.....	51
7.	Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal	52
8.	Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015	53
9.	Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017	54

10. Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	55
C. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Populasi Penelitian	57
B. Sampel dan Teknik Sampling	57
C. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	58
1. Kuesioner (Angket)	58
2. Wawancara	60
3. Metode Kepustakaan	60
D. Teknik Analisa Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Umum Penelitian	63
a. Desa Banjarsari	63
b. Karakteristik Responden	64
2. Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari terhadap Terbentuknya Dinasti Politik	68
a. Pengetahuan tentang Pilkada	69
b. Pengetahuan Masyarakat tentang Dinasti Politik.....	74
c. Dampak Dinasti Politik	77
d. Orientasi Pemilih.....	79
e. Elit Politik	82
f. Jaringan Sosial	84
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari terhadap Terbentuknya Dinasti Politik pada Pilkada tahun 2015	86
a. Pengetahuan tentang dinasti politik.....	86
b. Cara pandang Masyarakat Desa Banjarsari.....	89
B. PEMBAHASAN	91
BAB V PENUTUP.....	99

A. SIMPULAN	99
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

1. Tabel1.Skala <i>likert</i>	59
2. Tabel 2. Kriteria Penilaian Persepsi	62
3. Tabel 3. Tabel Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin	65
4. Tabel 4. Profil Responden berdasarkan Usia	65
5. Tabel 5. Profil Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
6. Tabel 6. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan.....	67
7. Tabel 7. Profil Responden berdasarkan Penghasilan	67
8. Tabel 8. Indikator Pengetahuan Masyarakat tentang Pilkada	68
9. Tabel 9. Indikator Pengetahuan Masyarakat tentang Dinasti Politik.....	74
10. Tabel 10. Dampak Dinasti Politik.....	77
11. Tabel 11. Indikator Orientasi Pemilih.....	79
12. Tabel 12. Indikator Elit Politik	82
13. Tabel 13. Indikator Jaringan Sosial	84

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Kerangka Berpikir 56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing	105
2. Lampiran 2. Instrumen Penelitian	106
3. Lampiran 3. Kuesioner	121
4. Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	125
5. Lampiran 5. Hasil Kuesioner.....	126
6. Lampiran 6. Hasil Wawancara	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum merupakan momen penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif.

Pemilu yang diselenggarakan di daerah dikenal dengan istilah pilkada. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah yang berfungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pilkada adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas penyerahan kekuasaan atau wewenang yang diberikan pemerintah pusat dengan asas desentralisasi. Pilkada adalah tombak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menempatkan rakyat sebagai subyek.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka ditetapkan bahwa pemilihan kepala daerah

dilaksanakan secara langsung (Hollyson dan Sundari, 2015:148). Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Banyak hal menarik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, salah satu diantaranya adalah adanya persyaratan untuk calon kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota) tidak memiliki ikatan keluarga dengan *incumbent* seperti yang disampaikan dalam pasal 7 huruf (r) disebutkan bahwa *tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*. Jika diamati dengan seksama, maka pasal ini merupakan upaya untuk mencegah timbulnya dinasti-dinasti politik di daerah. Pada saat ini dinasti politik mulai bermunculan di beberapa daerah. Dinasti politik ini dimungkinkan muncul karena tidak ada aturan yang mengatur dan membatasinya. Peraturan Perundang-Undangan yang ada tidak mengatur hubungan kekeluargaan pasangan calon kepala daerah dengan kepala daerah yang berkuasa sebelumnya (petahana). Aturan perundang-undangan yang ada lebih menitikberatkan pengaturan tentang sistem pemilihan, persyaratan, proses penyelenggaraan dan lain sebagainya.

Dinasti politik adalah kekuasaan yang diperoleh karena adanya hubungan kekeluargaan. Dinasti politik dapat diartikan sebagai kekuasaan

pemerintahan yang diperoleh baik dari pemilihan melalui DPRD ataupun pemilihan langsung dengan dukungan dari kepala daerah sebelumnya ataupun kepala daerah di wilayah sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Hollyson dan Sundari, 2015:149). Dukungan yang sangat kuat ini mampu memengaruhi dan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa calon yang mereka usung adalah calon yang terbaik, sehingga memenangkan pemilihan. Sedangkan di sisi lain kepala daerah terpilih masih mempunyai hubungan keluarga yang kuat dengan petahana. Hubungan kekeluargaan tersebut seperti istri, anak dan lain sebagainya.

Kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Keluarga-keluarga yang berkuasa ini akhirnya akan berevolusi menjadi dinasti-dinasti politik di daerah yang akan sulit untuk dikalahkan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Dengan demikian kekuasaan yang telah mereka miliki akan menjadi abadi.

Pada tahun 2015 terdapat pilkada serentak di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen dan Kabupaten

Pekalongan (KPU Kab. Pekalongan). Secara umum, pilkada serentak di Jawa Tengah berlangsung aman dan lancar.

Di antara pilkada serentak yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah dengan pelaksanaan pilkada yang menarik. Hal tersebut dikarenakan pada pilkada ini, istri dari bupati sebelumnya yaitu Drs. H. Amat Antono, M.Si yang telah menjabat dua periode juga ikut terdaftar sebagai calon wakil bupati yang ikut berkompetisi dalam memenangkan pilkada. Pilkada di Kabupaten Pekalongan diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yaitu: (1). H. Riswadi, SH-Hj. Nurbalistik yang diusung oleh PDIP; (2). H. Asip Kholbihi, SH, M.Si-Ir. Hj. Arini Harimurti yang diusung oleh PKB.

Pemilihan kepala daerah kabupaten Pekalongan diikuti oleh 70,13% atau 510.491 pemilih dari 727.934 daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan H. Asip Kholbihi SH, M.Si-Ir. Hj. Arini Harimurti. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Pekalongan, pasangan Asip dan Arini menang dengan perolehan suara sebesar 50,30% atau 250.620 suara. Sedangkan pasangan Riswadi dan Nurbalistik memperoleh suara sebesar 49,70% atau 247.583 suara (KPU Kab. Pekalongan).

Pemenang dalam pilkada Kabupaten Pekalongan masa jabatan tahun 2016-2021, Ir. Hj. Arini Harimurti atau wakil kepala daerah yang terpilih sebagai pasangan dari H. Asip Kholbihi SH, M.Si adalah istri dari Bupati Kabupaten Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si yang menjabat pada

periode sebelumnya. Drs. H. Amat Antono M.Si sendiri sudah dua kali menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Status Ir. Hj. Arini Harimurti sebagai istri bupati menjadikan dilema bagi para pemilih. Tidak sedikit para pemilih yang beranggapan jika Drs. H. Amat Antono M.Si yang merupakan suami dari Ir. Hj. Arini Harimurti sengaja mencalonkan istrinya sebagai wakil bupati agar dirinya dapat melanggengkan kekuasaannya melalui ikatan kekeluargaan sehingga ia masih bisa memengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pasangan Asip – Arini apabila terpilih sebagai pemenang. Sedangkan di sisi lain adapula pemilih yang menganggap Arini memang pantas menjadi wakil bupati karena ia memiliki pendidikan yang tinggi, serta memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memimpin daerahnya (wawancara, Sabtu 5 Desember 2015).

Keluarga atau kerabat dari Drs. H. Amat Antono M.Si sendiri banyak yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Arini sendiri sebelum terpilih menjadi wakil bupati adalah seorang PNS yang bekerja di BPMPKB Kabupaten Pekalongan. Nur Wigati yang merupakan adik kandung Amat Antono menduduki jabatan sebagai sekretaris Disperindakop UMKM Kabupaten Pekalongan. Kemudian, Jumiyati yaitu kakak kandung dari Amat Antono merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014 dan Tutik Harmonis yang juga merupakan adik kandung, saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Heterogenitas masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari pilihan politik. Dari perolehan kursi partai pada pemilu 2014, PKB menempati urutan pertama sedangkan PDIP berada di urutan kedua. Pilihan partai oleh masyarakat juga memiliki dampak yang besar bagi kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati. H. Asip Kholbihi SH., M.Si yang merupakan pasangan Ir. Hj. Arini Harimurti sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari PKB. Partai politik merupakan kendaraan politik bagi calon anggota legislatif maupun kepala daerah untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya. Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan (Budiardjo, 2006:161).

Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya materil. Kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki dapat menentukan atau menjamin keberlangsungan hidup partai tersebut. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses pilkada adalah loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan agama, ras, daerah atau keluarga tertentu. Loyalitas tersebut sangat memengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan mampu mengubahnya dengan alasan kedekatan secara primordial.

Pemilih cenderung memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda satu sama lain. Pandangan para pemilih yang bervariasi tersebut terjadi karena adanya proses persepsi. Rakhmat sebagaimana yang dikutip dalam Sobur (2013:446) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Proses persepsi berlangsung karena adanya stimuli yang menimpa seseorang individu melalui panca indera. Namun, tidak semua rangsangan mampu memperoleh perhatian, karena terjadi proses seleksi terhadap rangsangan tersebut. Dalam proses tersebut, seorang dapat memberikan penilaian yang positif atau negatif bergantung dari latar belakang yang dimilikinya. Kecenderungan penilaian dan pandangan tersebut berdampak pada perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Banjarsari pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015. Desa Banjarsari merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang memiliki partisipasi politik yang cukup tinggi dalam pilkada Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Desa Banjarsari yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ini memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPS Desa Banjarsari, sebanyak 1910 yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebanyak 75% atau 1444 pemilih telah menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Pekalongan.

Dengan melihat keikutsertaan masyarakat Desa Banjarsari dalam pilkada Kabupaten Pekalongan terhadap kemenangan Asip-Arini dengan perolehan suara sebesar 50,30%, memunculkan dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA BANJARSARI TERHADAP TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK PADA PILKADA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Untuk mengkaji persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015.

- b. Untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena dinasti politik Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori persepsi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami realitas dinasti politik di Kabupaten Pekalongan.

- 2) Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial khususnya tentang dinasti politik di Kabupaten Pekalongan dan menambah koleksi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dimaksudkan agar dapat terjadi kesamaan penafsiran dan kesatuan pandangan terhadap judul skripsi. Istilah yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Persepsi

Gulo (Sobur, 2013:446) mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi adalah proses penafsiran yang dipengaruhi oleh panca indera oleh masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015.

b. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada merupakan suatu proses pemilihan umum yang diselenggarakan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dimana menempatkan rakyat sebagai subjek dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut. Pilkada langsung pertama kali dilakukan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006. Dalam penelitian ini yang dimaksud pilkada adalah pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Pekalongan tahun 2015.

c. Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan

tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dinasti politik di daerah mengarah pada terbentuknya kekuasaan yang absolut sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga. Dinasti politik dalam penelitian ini adalah terjadinya pewarisan kekuasaan yang dilakukan oleh petahana kepada keluarganya untuk mempertahankan kekuasaannya yang diperoleh melalui pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Leavitt, persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Sobur, 2013: 445). De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita. Gulo (Sobur, 2013:445), mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan atau menafsirkan pesan. Pareek, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data (Sobur, 2013:446). Mulyana, persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan

persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya dan kelompok identitas (Sobur, 2013:445-446).

Davidoff (dalam Walgito, 2002:70) mengemukakan bahwa persepsi merupakan serangkaian proses yang bersifat individual. Dalam proses persepsi individu melibatkan perasaan, kemampuan berpikir dan pengalaman-pengalamannya sehingga meskipun objek sama tetapi karena kemampuan individu tidak sama, maka memungkinkan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain juga tidak sama. Melalui proses persepsi inilah individu dapat menyadari dan mengerti lingkungan sekitarnya. Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses seseorang menerima, menguji, dan memberikan reaksi terhadap rangsangan panca indera untuk dapat mengartikan suatu bayangan. Persepsi melibatkan perasaan, kemampuan berpikir dan pengalaman-pengalaman maka persepsi individual, meskipun kemampuan setiap individu tidak sama maka memungkinkan hasil dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang berbeda.

Kemp dan Dayton (dalam Prawiradilaga, dkk, 2004:132) menganggap persepsi sebagai suatu proses dimana seseorang menyadari keberadaan lingkungannya serta dunia yang mengelilinginya. Persepsi terjadi karena setiap manusia memiliki

indera untuk menyerap obyek-obyek serta kejadian disekitarnya. Pada akhirnya persepsi dapat memengaruhi cara berpikir, bekerja, serta bersikap pada diri seseorang. Hal ini terjadi karena orang tersebut dalam mencerna informasi dari lingkungan berhasil melakukan adaptasi sikap, pemikiran atau perilaku terhadap informasi tersebut.

Fleming dan Levie (dalam Prawiradilaga, dkk, 2004:134-135) mengemukakan prinsip dasar persepsi yang perlu diketahui yaitu:

1) Persepsi bersifat relatif

Persepsi relatif menyatakan bahwa setiap orang akan memberikan persepsi yang berbeda, sehingga pandangan terhadap sesuatu hal sangat tergantung dari siapa yang melakukan persepsi.

2) Persepsi bersifat selektif

Persepsi sangat selektif tergantung pada pilihan, minat, kegunaan, dan kesesuaian bagi seseorang.

3) Persepsi dapat diatur

Persepsi dapat diatur atau ditata agar orang lebih mudah dicerna lingkungan atau stimulus (materi belajar).

4) Persepsi bersifat subyektif

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh harapan atau keinginan tersebut.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Sobur (2013:449-450), menjelaskan tiga langkah dalam proses persepsi, yaitu:

- 1) Terjadinya stimulasi alat indera (*sensory stimulation*)
 Pada tahap ini, alat indera distimulasi (dirangsang). Meskipun memiliki kemampuan penginderaan untuk merasakan stimulus (rangsangan), kita tidak selalu menggunakannya.
- 2) Stimulasi terhadap alat indera diatur.
 Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indera diatur menurut berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip proksimitas atau kemiripan dan prinsip lain adalah kelengkapan.
- 3) Stimulasi alat indera ditafsirkan-dievaluasi
 Langkah ketiga dalam proses perseptual adalah penafsiran-evaluasi. Langkah ketiga ini merupakan proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran-evaluasi kita tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada pada kita.

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai berikut.

- 1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kecerdasan, dan kepribadian. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Soelaeman, dalam Sobur, 2013:447)

Menurut Pareek (dalam Sobur 2013:451-464), persepsi adalah sumber pengetahuan kita tentang dunia, dalam definisi yang dikemukakan ini mencakup beberapa segi atau proses sebagai berikut.

- 1) Proses menerima rangsangan.
Proses pertama dalam persepsi ialah menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui panca indera.
- 2) Proses menyeleksi rangsangan.
Setelah diterima, rangsangan atau data diseleksi. Ada dua faktor yang menentukan seleksi rangsangan itu, yaitu faktor intern dan ekstern.
- 3) Proses pengorganisasian.
Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan, yaitu pengelompokkan, bentuk timbul dan latar, kemantapan persepsi.
- 4) Proses penafsiran.
Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima lalu menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. Persepsi pada pokoknya memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima.
- 5) Proses pengecekan.
Sesudah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Proses pengecekan ini mungkin terlalu cepat dan orang mungkin tidak menyadarinya.
- 6) Proses reaksi.
Tahap akhir dari proses perseptual ialah bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang berbuat suatu hubungan dengan persepsinya.

Dalam bukunya psikologi umum dalam lintasan sejarah, Sobur (Sobur, 2013:448) mengatakan bahwa persepsi dari masing-masing orang bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Tingkat pendidikan yang berbeda-beda
- 2) Sosial budaya dari masing-masing individu yang berbeda.
- 3) Tempat tinggal (lingkungan yang berbeda, misalnya perkotaan atau pedesaan).
- 4) Pribadi dari masing-masing individu yang berlainan.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi Persepsi

Persepsi merupakan sesuatu proses yang tidak terjadi begitu saja, tetapi melampaui beberapa tahap untuk terjadinya proses persepsi. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito (2002:71) meliputi:

- 1) Adanya objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor, dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- 2) Alat indera atau reseptor. Yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) Adanya perhatian, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi terhadap sesuatu diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

Faktor yang memengaruhi persepsi yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Koentjaraningrat, 1985: 103).

- 1) Faktor-faktor intern berkaitan dengan diri sendiri, yaitu:
 - a) Sikap, yaitu disposisi atau keadaan mental dalam jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya maupun masyarakat, baik lingkungan alamiah maupun fisik.
 - b) Kognisi, adalah proses berpikir pada rasionalitas dan logika. Unsur dari kognisi adalah kepercayaan evaluatif dari seseorang

yang diwujudkan dalam bentuk kesan yang baik yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu obyek. Jadi kognitif yaitu suatu proses seseorang untuk mempercayai sesuatu setelah menyeleksi atau meneliti terlebih dahulu. Dalam hal ini termasuk anggapan seseorang terhadap suatu kegiatan yang diwujudkan dalam kesan baik atau buruk.

- c) Nilai, adalah kumpulan dari perasaan senang pandangan, keharusan, kecenderungan dalam arti diri seseorang, pendapat yang rasional, prasangka yang menentukan pandangan tentang dunia. Jadi diungkapkan dengan pernyataan senang atau tidak senang.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern yaitu semua faktor yang berasal dari luar diri manusia, yang berupa stimulus-stimulus yang dapat ditangkap oleh indera manusia dalam intensitas tertentu, seperti situasi atau keadaan tertentu pada lingkungan yang mengelilingi individu tersebut.

Menurut Rakhmat dan Crutchfield (dalam Sobur, 2013:460-462)

faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang dapat dikategorikan menjadi empat faktor, yaitu:

1) Faktor fungsional

Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu.

2) Faktor struktural

Faktor struktural timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu.

3) Faktor situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang memengaruhi persepsi.

4) Faktor personal

Faktor personal yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian. Pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Motivasi merupakan faktor yang memengaruhi stimuli yang akan diproses. Dan kepribadian adalah ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan dari orang lain yang merupakan karakteristik seorang individu.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a. Pengertian

Seperti halnya suatu negara, daerah yang merupakan bagian dari unsur negara juga memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut bersumber dari kepanjangan kepentingan dan kekuasaan negara (pusat), sekaligus manifestasi kehendak rakyat di daerah. Dalam negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, pucuk pemimpin pemerintahan di daerah berada pada seorang kepala daerah (penguasa daerah). Sistem pemilihannya pun dipengaruhi oleh tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan elit politik dan kehendak publik yang telah berlangsung sejak kekuasaan lahir dalam suatu negara.

Beberapa variasi dalam sistem pilkada (Hikmat, 2013:118-119):

- 1) Sistem penunjukan dan atau pengangkatan oleh pemerintah/pejabat pusat. Sistem ini diterapkan di negara-negara kesatuan (unitaris) yang masih mewarisi monarki, emirat atau atorianisme dengan variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.
- 2) Sistem pemilihan perwakilan oleh dewan (*council*). Sistem ini digunakan hampir oleh dua pertiga negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan negara kesatuan.
- 3) Sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer digunakan dinegara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara federasi, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada.

Negara-negara berkembang yang menganut paham demokrasi acapkali melakukan eksperimen-eksperimen dalam usaha membangun sistem demokrasi dengan argumen kondisional, termasuk dalam rekrutmen kepala daerah.

b. Pilkada Langsung

Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di tingkat daerah yang menentukan berjalannya pemerintahan daerah tersebut selama periode lima tahun. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah ikut menentukan siapa yang akan memimpin sebagai kepala daerah. Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang diatur dalam UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan pemilihan kepala daerah. Sebagai suatu sistem, pilkada memiliki ciri-ciri antara lain bertujuan memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlihat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem. Setiap kegiatan saling terikat dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.

Di Indonesia, pilkada langsung pernah dituangkan dalam UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada pasal 23 ayat (1) dinyatakan: "*Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang*". Di bagian penjelasan ditegaskan, "*Kepala daerah haruslah seorang yang dekat dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, dan karena itu kepala daerah haruslah orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan*

diserahi kekuasaan atas kepercayaan tersebut. oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk memenuhi maksud tersebut kepala daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan.”

Menurut Linz dan Lipset (dalam Pradhanawati, 2005:10), demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan harus memenuhi 3 syarat pokok yaitu kompetisi, partisipasi politik, kebebasan sipil dan politik dapat terwujud dalam proses politik ke arah penguatan demokrasi lokal.

Rousseau (dalam Mariana dan Paskarina, 2008:32) menjelaskan bahwa demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Beberapa argumen yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung dengan legitimasi pemerintahan daerah (dalam Mariana dan Paskarina, 2008:32-34) yaitu :

- 1) Pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus oligarki partai yang mewarnai pola pengorganisasian elit politik di DPRD serta untuk memutus distorsi dan politisasi aspirasi publik yang cenderung dilakukan partai dan para politisasi partai jika kepala daerah dipilih secara etis oleh DPRD.
- 2) Pilkada langsung dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal termasuk kepala-kepala daerah. Mekanisme pilkada secara perwakilan cenderung menciptakan ketergantungan

berlebihan kepala daerah terhadap DPRD, sehingga lebih condong pada praktik KKN.

- 3) Pilkada langsung akan memperkuat dan meningkatkan seleksi kepemimpinan elit lokal sehingga membuka peluang bagi munculnya figur-figur alternatif yang memiliki kapabilitas dan dukungan riil di masyarakat lokal.
- 4) Pilkada langsung meningkatkan kualitas keterwakilan kerana masyarakat dapat menentukan pemimpinnya di tingkat lokal.

Adapun menurut Ramlan Surbakti (2006:4-5), ada dua alasan mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Pertama, agar lebih konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial antara lain ditandai oleh pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Karena itu sebagaimana pada tingkat nasional presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka untuk kepala daerah otonom juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan memilih secara langsung siapa yang memimpin suatu daerah, rakyat yang berhak memilih dapat menentukan kepala daerah macam apakah yang memimpin daerahnya.

Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek (*check and balances*) antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Salah satu ciri pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling

mengecek adalah baik lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Surbakti, 2006:4-5).

Pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati ataupun walikota/wakil walikota. Aktor utama dalam sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Melalui pilkada langsung, rakyat menentukan calon berdasarkan kredibilitas dan kapabilitasnya. Publik daerah melihat rekam jejak dan pengabdian mereka pada daerah itu sendiri.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan bagian dari pemilihan umum apabila dilihat dari tahapan pelaksanaannya. Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan, yaitu dari kepala daerah dipilih oleh DPRD menjadi kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya dengan memilih calon secara berpasangan. Dalam implementasinya, Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 2004, tetapi pemilihan kepala daerah secara langsung baru dapat dilaksanakan pada 2005.

Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terlihat jelas dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau, dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada langsung selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan sebagainya.

Gaffar (dalam Prihatmoko, 2005:35-36) mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington, dan Bingham Powel mengatakan parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:

- 1) Menggunakan mekanisme pemilihan yang teratur
- 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
- 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
- 4) Akuntabilitas publik

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi, antara lain:

- 1) Pemilihan umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk, kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan dihati masyarakat akan dipilih kembali.

2) Rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki. Artinya, jika seseorang yang berkuasa terus menerus atau satu partai politik yang mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi memberi peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang kepala daerah ke kepala daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik lainnya.

3) Rekrutmen terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau sekelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu, dalam mengisi jabatan politik, seperti kepala daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua

orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

4) Akuntabilitas publik

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang kepala daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukannya kebijakan B, mengapa menaikkan pajak daripada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Demikian pula yang dilakukan keluarga terdekatnya, atau teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

Selain itu, pilkada langsung dapat disebut praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yaitu dengan menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka (Prihatmoko, 2005:110-111):

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2) Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melakukan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diketahui oleh orang lain.

5) Jujur

Setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

3. Dinasti Politik

Politik dinasti atau dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis serta elit aktifis.

Menurut Pareto (dalam Varma 2007:206) yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Sementara Gaetano Mosca (dalam Varma 2007:206) menyebutkan bahwa setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua

fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.

Mosca meneliti kompetisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran 'kekuatan sosial' tertentu. Mosca mengenalkan konsep 'sub elit' yang merupakan kelas menengah dari para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Kelas menengah ini dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurutnya stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini. Menurut Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elite. Setiap elit yang memerintah, hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi sirkulasi elit akan berjalan karena secara individual baik elit keturunan maupun elit yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis.

Kekuasaan elit menurut Mosca adalah sebagai akibat sifat-sifat yang tidak terbantahkan dari watak sosial manusia. Selanjutnya dikatakan, bahwa kelas politik yang tidak adaptif dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elit lain akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. Sistem demokrasi, menurut Mosca tidak memiliki dasar substantif sebagai kekuasaan mayoritas,

bahkan dianggap sebagai kemerosotan elit. Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwa rekrutmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik.

Setelah berlangsung tiga kali pemilu dalam masa reformasi, ada fenomena yang menarik kalau di dalam teori politik kontemporer elit biasanya berdasar golongan, misalnya militer, partai, birokrasi dan sebagainya. Belakangan muncul varian lain dari elit politik, dimana elit politik ini berbasis kekeluargaan. Kenyataan tersebut cenderung akan memupuk munculnya dinasti-dinasti politik di tingkat pusat atau lokal.

Oleh karenanya, kedekatan politik keluarga inilah yang kemudian menguatkan jaringan politik. Menurut Turner suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika jaringan tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Akhirnya apabila hal itu terjadi, maka dikhawatirkan menjadi budaya politik di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan mengganggu demokratisasi secara keseluruhan.

a. Pendekatan Elit dalam Memahami Dinasti Politik

Pareto dan Gaetano (dalam Varma, 2007: 217) mengemukakan satu tesis bahwa dalam setiap masyarakat wujud sekelompok orang yang memerintah (*ruling class/governing class*) dan sekelompok lainnya diperintah (*ruled class*). Kelompok atau golongan yang pertama berjumlah lebih kecil daripada kelompok/golongan yang disebut terakhir.

Bottomore membedakan kelompok elit menjadi tiga, yaitu: (i) elit yang mendefinisikan dari segi fungsional, terutama sekali kelompok pekerja yang mempunyai status tinggi dalam masyarakat; (ii) klas politik termasuk semua kelompok yang menggunakan atau mempunyai kuasa politik dan pengaruh dan secara langsung terlibat dalam politik keseharian; (iii) elit politik yaitu sekumpulan kecil klas politik yang terdiri dari individu-individu yang sebenarnya menjalankan kuasa politik dalam sebuah masyarakat.

Golongan elit menganggap kesetiaan sebagai satu sifat yang hanya dipunyai oleh keluarga, saudara dan kerabat dekat. Mereka berhati-hati untuk menerima orang dari luar lingkungan dan mereka juga mempunyai pandangan negatif terhadap kesetiaan orang-orang dari luar keluarganya yang mungkin saja dapat mengganggu kestabilan dinasti politiknya. Sikap ini menjadi prinsip dasar bagi elit politik dalam memilih anggota-anggotanya yang hendak direkrut ke dalam dinasti politik.

Elit sangat menentukan perilaku masyarakat, apalagi jika elit yang berkuasa dianggap oleh masyarakat luas sebagai bagian dari keluarga besarnya. Peranan elit dapat menentukan bangkitnya sistem politik yang demokratik ataupun yang sebaliknya, yaitu sistem politik yang berasaskan kekeluargaan dan dinasti.

b. Faktor-faktor terbentuknya Dinasti Politik

1) Patronase Politik

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di suatu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Scott (dalam Agustino, 2014:173) berargumen bahwa:

Patron klien didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang yang melibatkan instrumen persahabatan, dimana tingginya status sosial ekonomi digunakan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang memiliki status rendah, untuk membalasnya dilakukan dengan cara menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk pelayanan pribadi dan menjadi pelindung.

Sedangkan Lande (dalam Agustino, 2014:173) mendefinisikan relasi patronase sebagai berikut.

Hubungan patron klien secara vertikal yaitu aliansi antara dua orang dengan status, kekuasaan, atau sumber daya yang berbeda-beda yang masing-masing merasa memiliki anggota superior secara pribadi disebut pelindung. Anggota yang lebih rendah disebut klien.

Patronase terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu sisi, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status dan pengaruh. Sedangkan disisi lain, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran

kepentingan”. Hubungan ini akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Pilkada langsung telah membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi, karena kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilih sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, karena melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya serta mendistribusikan *public resources* yang berada dibawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu.

2) Jaringan Sosial

Jaringan sosial adalah hubungan-hubungan interaksi antar individu, dimana pola hubungan-hubungan interaksi dan kaitan-kaitan para anggotanya sebagai individu yang bebas dengan individu-individu lain sehingga membentuk suatu komunitas sosial. Jaringan sosial adalah suatu jaringan yang sengaja dibangun oleh aktor politik yaitu kandidat ataupun partai politik yang membentuk sebuah hubungan relasi kekerabatan dan hubungan sosial terhadap pihak yang dianggap bisa memberikan kontribusi positif bagi perolehan dukungan politik yang diusungnya (dalam

Mubarok,2004:3). Penggunaannya oleh para aktor politik merujuk pada hubungan yang sengaja dijalin agar mendapatkan suatu keuntungan balas jasa baik berupa materi maupun dukungan terhadap sistem dan ideologi politik yang diusungnya. Penggunaan strategi jaringan sosial ini dalam dunia politik lebih fokus pada pola-pola pengaruh dan penyebaran pengaruh yang menimbulkan efek nyata. Tujuan dari jaringan sosial ini antara lain yaitu untuk membangun loyalitas pemilih, membentuk stereotip, dan membentuk prasangka (Mubarok,2004:4).

Loyalitas pemilih tercipta ketika rekan politik yang masuk dalam pihak sekutu dalam jaringan sosial dari kandidat dan partai politik tertentu bisa menggunakan kemampuannya untuk menjaring dan mengarahkan massa agar memberikan dukungannya kepada kandidat dan partai politik tertentu yang berdiri sebagai rekan politiknya.

Pembentukan stereotip oleh rekan politik sekutu dari jaringan sosial dari kandidat dan partai politik tertentu adalah dapat menciptakan keyakinan dari pemilih bahwa kandidat dan partai politik sekutunya itu adalah yang paling positif dari segala hal dan menganggap yang lain negatif.

Adanya jaringan sosial yang sengaja dibentuk oleh kandidat atau partai politik ditujukan agar aktor-aktor yang berada dalam jaringan sosial tersebut bisa menciptakan inovasi pendekatan guna

meraih simpati massa. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain dengan membentuk prasangka terhadap kelompok ataupun kandidat dan partai politik lain yang menjadi pesaing dari rekan sekutu politik dari jaringan sosial tersebut.

4. Perilaku Memilih

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya terutama dalam hubungan dengan pemerintah yang ada (Pamungkas, 2010:12). Kegiatan partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati kegiatan itu diarahkan memengaruhi selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk juga dalam kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum. Alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang telah dibuat.

b. Orientasi Politik

Orientasi politik (dalam Pamungkas, 2010:12) adalah nilai-nilai yang bersumber pada pluralitas seseorang dimana tanggapan anggota-anggota masyarakat terhadap orientasi itu sangat dipengaruhi oleh nilai yang mereka miliki. Nilai-nilai itulah yang memengaruhi, membentuk keseluruhan sikap masyarakat terhadap suatu orientasi yang kemudian muncul ke permukaan sebagai orientasi politik masyarakat.

Di dalam masyarakat tentu saja ada individu yang melepaskan diri dari kungkungan sesuatu nilai. Ada kemungkinan bahwa individu yang demikian memiliki orientasi yang berbeda daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kondisi ini sering disebut sebagai penyimpangan yaitu situasi yang dapat berkonotasi negatif dan positif, sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri.

c. Definisi Perilaku Pemilih

Aktifitas manusia yang berhubungan dengan dunia politik pada dasarnya merupakan partisipasi politik. Menurut Samuel P. Huntington (dalam Pamungkas, 2010:15) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau seporadis, secara damai atau kekerasan, legal ataupun ilegal. Bentuk dari partisipasi politik ini salah satunya adalah perilaku memilih.

Perilaku memilih merupakan suatu bentuk tindakan partisipasi politik dari aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi demokrasi. Perilaku memilih (*Votting behavior*) adalah sebuah wujud dari penegakan demokrasi di suatu negara. Dengan adanya perilaku memilih oleh masyarakat di suatu negara maka negara tersebut bisa dikatakan mempunyai basis pendidikan politik yang tinggi. Perilaku memilih adalah elemen penting dalam sebuah pemilihan umum dimana keterlibatan masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan

umum sebagai bukti nyata dari pendidikan politik yang berjalan dengan baik di daerah tersebut.

d. Postulat Hukum Perilaku Pemilih

Voting behavior di Indonesia dapat dirumuskan dalam sejumlah postulat hukum. Dalam makalah hukum-hukum perilaku pemilih di Indonesia, Pamungkas (2009) memaparkan setidaknya ada 7 (tujuh) postulat hukum perilaku pemilih di Indonesia. Hukum perilaku pemilih di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Warna aliran dari sebuah partai politik memengaruhi perilaku pemilih.

Aliran politik di Indonesia untuk saat ini dapat dipilih dalam tiga kategori aliran yaitu: sekuler, moderat, dan agama. Perilaku pemilih akan ditentukan oleh persepsi diri mereka mempersepsikan ideologi partai politik yang ada. Apabila pemilih mempersepsikan dirinya dalam kluster sekuler maka pilihan politiknya akan jatuh pada partai yang berada pada kluster tersebut. Pemilih yang berada dalam kluster aliran tertentu sangat kecil kemungkinannya untuk memilih partai diluar kluster dimana ia berada.

2) Partai dengan spektrum ideologi ekstrim tidak akan mendapatkan dukungan pemilih dalam jumlah yang signifikan. Secara linier spektrum ideologi berada dalam kutub fundamentalis sekuler dan fundamentalis agama. Mereka yang berada dalam kutub ekstrim tersebut adalah minoritas. Partai yang mendeklarasikan dirinya dalam posisi ini akan terlikuidasi dengan sendirinya.

- 3) Partai dengan spektrum ideologi tengah atau moderat mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Hukum ketiga ini merupakan anti tesis hukum kedua dari perilaku pemilih di Indonesia. Partai dengan ideologi moderat memiliki modal dasar untuk mendapatkan dukungan besar dari pemilih. Untuk mengaktualkan potensi itu partai-partai tengah/moderat hanya perlu memoles organisasinya untuk dapat dikenal publik secara luas.
- 4) Sirkulasi suara pemilih hanya berputar dalam lingkup spektrum ideologi yang sama. Apabila terjadi suara yang berpindah (*swing voter*) maka perpindahan suara pemilih tidak akan melintasi kluster ideologi yang ada. Peningkatan perolehan suara sebuah partai hanya akan mengurangi perolehan suara partai lain dalam kluster yang sama. Dengan kata lain, naik-turun perolehan suara partai adalah proses menambah dan mengurangi perolehan suara partai dalam kluster yang sama. Kanibalisme terjadi diantara partai-partai dalam kluster ideologi yang sama. Kanibalisme tidak terjadi melintasi kluster-kluster ideologi.
- 5) Perilaku pemilih yang melintas batas kluster ideologi dapat terjadi pada suara pemilih protes (*protes voter*). Pemilih protes merupakan bentuk ekspresi politik dalam situasi yang tidak normal. Pemilih protes ini muncul diantaranya akibat dari konflik internal partai maupun perlakuan tidak adil penguasa terhadap sebuah partai politik

tertentu. Perilaku pemilih menyeberangi lintas batas kluster ideologi sebagai pelampiasan atas situasi tersebut.

- 6) Ketokohan partai mampu mendongkrak perolehan suara partai. Ketokohan partai adalah magnet partai. Perilaku pemilih dapat berubah terkait dengan eksistensi pemimpin dan kepemimpinan partai. Apabila di dalam partai terdapat tokoh yang berwibawa dan disegani maka pemilih akan cenderung memilih partai dengan ketokohan partai yang jelas. Apabila partai politik tidak memiliki tokoh sentral maka daya magnetik partai akan berkurang.
- 7) Penistaan terhadap seorang tokoh atau partai akan melahirkan simpati pemilih untuk memberikan suara kepada tokoh atau partai tersebut. Partai-partai dengan tokoh dinistakan oleh lawan politiknya maka akan mendapat simpati yang lebih dari pemilih. Sebaliknya partai atau tokoh yang agresif atau menistakan lawan politiknya cenderung akan dijauhi pemilih.

e. Pendekatan-Pendekatan Perilaku Pemilih

Dalam ilmu politik, studi mengenai perilaku pemilih dalam menentukan pilihan baik partai politik pilihannya ataupun dalam menentukan kandidat calon pengisi jabatan pemerintahan diwarnai dengan tiga pendekatan (Asfar, 2006:47):

1) Pendekatan sosiologis (*Social determinism approach*)

Pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial serta pengelompokan kemasyarakatan mempunyai pengaruh kuat terhadap

perilaku pemilih. Keanggotaan seseorang dalam suatu keluarga, organisasi keagamaan, organisasi profesi, faktor usia, jenis kelamin, dan status sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang dalam memilih partai ataupun kandidat pada waktu diadakan pemungutan. Karakteristik sosial dan pengelompokan kemasyarakatan berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat. Hal ini karena kelompok-kelompok tersebut memiliki peranan vital dalam memengaruhi perilaku individu yang masuk dalam kategori tersebut.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan konsep sikap dan sosialisasi politik. Para pendukung pendekatan ini beranggapan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dan kepribadian dirinya serta merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membuat pilihan. Sikap dianggap identik dengan fungsi kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi serta pertahanan diri. Pendekatan ini juga berpendapat sosialisasi politik yang ditujukan terhadap individu mempunyai peranan penting dalam menentukan pilihan yang dibuatnya. Sosialisasi ini merupakan proses panjang yang berlangsung semenjak masa anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Dengan terjadinya proses sosialisasi politik ini maka akan tercipta hubungan psikologis yang erat antara individu dengan partai politik yang melakukan aktivitas sosialisasi baik untuk kandidat yang diusung partai politik dan partai politik itu sendiri.

Ikatan ini sering disebut sebagai identifikasi partai yang terutama menentukan pilihan politik seseorang.

3) Pendekatan Rasional

Menurut pandangan ini manusia adalah makhluk rasional. Individu dalam menentukan partai politik ataupun kandidat didasari hasil kalkulasi untung dan rugi. Partai politik dan kandidat yang diusungnya memiliki program-program paling banyak membawa keuntungan bagi dirinya serta memiliki resiko paling sedikit bagi kepentingannya dipastikan menjadi pilihannya.

f. Orientasi Pemilih

Quis & Crano (dalam Firmanzah, 2008:99) mengemukakan bahwa orientasi pemilih untuk menentukan faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa dan bagaimana pemilih menyuarakan pendapatnya tentang suatu yang penting baik dalam teori maupun praktik. Dalam hal ini untuk menganalisis perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya adalah model kesamaan (*similitary*) dan daya tarik (*attraction*). Setiap individu akan tertarik pada suatu hal yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama dengan dirinya. Semakin dua pihak berbagi karakteristik yang sama (*similitary*) maka akan meningkat pula rasa saling tertarik (*attraction*) satu sama lain, kelompok-kelompok yang tercipta dalam masyarakat lebih banyak disebabkan oleh kenyataan masing-masing individu dalam suatu kelompok memiliki kesamaan sehingga mereka membuat grup-grup dalam masyarakat. Untuk mengukur cara pemilih

dalam menilai kedekatannya dengan partai politik atau kontestan dibagi dalam dua hal:

1) Kesamaan mengenai cara pemecahan masalah (*orientasi policy problem solving*)

Orientasi ini menjelaskan bahwa pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai politik atau calon kandidat) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin efektif kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat tentang permasalahan yang ada di daerah tersebut maka semakin tinggi pula probabilitasnya untuk dipilih oleh para pemilih. Para pemilih memiliki kecenderungan untuk tidak memilih partai atau kandidat yang kurang mampu menawarkan program kerja yang tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi dan hanya mengandalkan spekulasi dan jargon-jargon politik saja. Agar bisa diterima oleh masyarakat, solusi yang ditawarkan harus memiliki kekuatan argumentasi yang didukung oleh data-data yang akurat. Bartels (dalam Firmanzah, 2008:102) berargumen bahwa ketidakpastian atas program kerja partai atau kandidat memiliki efek negatif terhadap persepsi pemilih.

2) Kesamaan dalam faham serta nilai dasar ideologi (*orientasi ideology*)

Gerring (Firmanzah, 2008:106) mengemukakan bahwa ideologi dianggap sebagai identitas yang menyatukan satu kelompok atau golongan dan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok atau golongan lain. Ideologi melingkupi semua sistem nilai, keyakinan,

simbol, mitos, ritual dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat. Hubungan yang terjadi antara ideologi dan politik tidak akan terpisahkan disini diartikan bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berfikir yang mewarnai dan memengaruhi cara bersikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang dalam suatu kelompok sosial. Dalam hal ini ideologi dapat berupa metode dan tujuan akhir yang ingin diperjuangkan oleh partai politik dan kandidat. Gidengil et al berargumen bahwa dalam banyak hal, struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kandidat seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka (dalam Firmanzah, 2008:106). Kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kandidat memberikan kecenderungan kepada para pemilih untuk memilih partai atau kandidat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka daripada partai politik atau kandidat yang memiliki ideologi yang berbeda.

g. Jenis-Jenis Pemilih

1) Pemilih rasional

Pemilih ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu parpol atau kandidat. Pemilih dalam hal ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, tradisional dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya dengan mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Program kerja (*platform*) dan kinerja partai

atau kandidat dalam program kerjanya. Program kerja (*platform*) dan kinerja partai atau kandidat biasanya termanifestasikan pada reputasi dan citra (*image*) yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini hal yang paling utama bagi partai politik atau kandidat adalah mencari cara agar mereka bisa membangun reputasi di depan publik dengan mengedepankan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah tersebut. Mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan, disintegrasi nasional, dll.

2) Pemilih Kritis

Pemilih ini perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap partai politik atau kandidat cukup tinggi dan tidak mudah *rational voter* untuk berpaling ke partai politik atau kandidat lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme:

- a) Jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan.

- b) Pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik atau kandidat baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.
- 3) Pemilih tradisional

Rohrschneider (dalam Firmanzah, 2008:123), pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak melihat kebijakan partai politik atau kandidat sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini. Apa saja yang dikatakan oleh seorang pemimpin partai politik dan kandidat merupakan sebuah kebenaran yang sulit dibantah. Ideologi dianggap sebagai landasan dalam membuat keputusan serta bertindak dan terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat.

4) Pemilih skeptis

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam partai politik sangat kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Jenis pemilih ini sangat mendominasi adanya golongan putih (golput). Walaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

1. Membangun Dinasti Politik melalui Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo

Masda Putri Amelia dalam jurnalnya yang berjudul *Membangun Dinasti Politik melalui Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo* mengemukakan bahwa dinasti politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Dinasti politik merupakan kekuasaan yang dipegang secara turun temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah politik pendahulunya dengan cara penunjukan istri, suami, anak, paman dan

semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam lembaga politik. Biasanya ini adalah cara agar sanak family tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik baik sebagai bupati/wakil bupati (eksekutif) maupun sebagai anggota perwakilan rakyat/DPRD. Hal ini dapat menghambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Dinasti politik di daerah dapat dilihat dari hubungan antara aktor-aktor dalam struktur politik, yang mana terdapat hubungan keluarga diantara mereka. Walikota sebagai lembaga eksekutif didukung oleh suami dan putranya yang menduduki jabatan-jabatan dalam infrastruktur, baik dalam kelompok kepentingan sebagai elit ekonomi maupun elit agama. Keluarga beserta teman dekat walikota memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dapat memengaruhi masyarakat sehingga kedudukan elit tersebut sangat terlihat dalam masyarakat. Hubungan walikota dengan keluarga dan teman dekatnya merupakan jejaring yang digunakan untuk mempertahankan kekuasannya. Dengan demikian maka dapat membantu walikota dalam membangun dinasti politik.

2. Pelanggaran Dinasti Politik “Samawi” Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul tahun 2010

Desiana, Rina, dan Adninda dalam jurnalnya yang berjudul *“Pelanggaran Dinasti Politik “Samawi” Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul tahun 2010”* mengemukakan bahwa pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010, terdapat calon bupati

yaitu Idha Samawi yang merupakan istri dari bupati Bantul periode sebelumnya. Pencalonan Idha ditengarai sebagai proses pelanggaran kekuasaan klan “Samawi” di Bantul. Kemenangan Idha dalam pilkada Bantul tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keluarga Samawi dalam dirinya. Banyak masyarakat yang sudah terpengaruh bagaimana kebaikan Idha Samawi ketika menjadi bupati dengan kebijakan-kebijakan populisnya. Sehingga masyarakat menganggap bahwa memilih Idha maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang sama dengan sosok Idha Samawi. Selain itu figur Idha yang dianggap keibuan, perhatian dan sosok idaman bagi masyarakat juga memengaruhi psikologis pemilih untuk memberikan dukungannya kepada Idha. Dengan demikian, perilaku pemilih ini dapat dikategorikan perilaku pemilih model psikologis karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

3. Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah

Agus Sutisna dalam jurnalnya yang berjudul *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*, sejak terbentuk menjadi provinsi yang mandiri, terpisah dari Jawa Barat, kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, dominasi *the local strongmen*, Tb. Chasan Sohib dalam kepolitikan Banten sangat menonjol dan berhasil menempatkan anaknya, Ratu Atut Chosiyah pada jabatan

gubernur selama hampir dua periode (2006-2011 dan 2011-2014). Pasca keberhasilannya menduduki jabatan gubernur, secara hipotetik Ratu Atut berhasil membangun dan mengembangkan dinasti politiknya ke berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada obyek tatakelola dan praktik kekuasaan pemerintahan gubernur di Provinsi Banten, dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik atau politik kekerabatan di Provinsi Banten pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengalami proliferasi (persebaran, pertumbuhan) di berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, triangulasi, studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik atau politik kekerabatan pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten memperlihatkan adanya gejala persebaran (proliferasi, pertumbuhan), bukan saja pada ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyebar di banyak arena kehidupan masyarakat, seperti pada arena kehidupan bisnis, sosial-budaya, pendidikan, dan keormasan.

4. Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015

Dewi Masitah dalam jurnalnya yang berjudul *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015* menjabarkan bahwa politik dinasti ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena

sudah terjadi mulai jaman orde baru sampai reformasi sekarang. Politik dinasti ini sudah mengakar ke daerah mulai dari presiden sampai kepala desa. Mereka yang terpilih selalu mengingkari bahwa ini politik dinasti tapi pilihan rakyat murni. Benarkah demikian? Apakah benar ini pilihan rakyat murni? Bagaimana sekeluarga menjadi kepercayaan masyarakat secara berbarengan. Hal ini mirip politik kerajaan ataupun dinasti. Kebingungan pemahaman makna praktek politik demokrasi yang berwujud Dinasti inilah perlu kita kaji bersama bagaimana makna demokrasi dan dinasti sesungguhnya secara hermeneutika? Agar masyarakat kita bisa menggunakan rasio dalam memilih nanti dengan benar-benar objektif. Masalah tafsir politik ini menurut prespektif Dilthey, bahwa sebuah fenomena harus ditempatkan pada situasi keseluruhan yang lebih luas tempat fenomena tersebut mendapatkan maknanya, bagian-bagian memperoleh pemaknaan dari keseluruhan dan keseluruhan mendapatkan pemaknaan dari bagian-bagian. Jadi yang menjadi penekanannya bergeser dari pemahaman empatik atau rekonstruksi proses mental orang lain ke arah penafsiran hermeneutik tentang produk budaya struktur konseptual. Dari prespektif hermeneutika diatas bahwa fenomena demokrasi yang menghasilkan pilihan dimana terdapat keluarga dinasti sebut saja politik kerajaan adalah sebuah demokrasi sesuai prosedural yang diwarnai kapitalistik dan transaksional antara masyarakat dan calon kepala daerah tersebut yang sudah tersistematiskan. Hal ini terbukti tidak adanya kabar atau informasi apapun yang diberikan Panwaslu Daerah terkait penyimpanganpenyimpangan calon. Dengan demikian membangun demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas ini akhirnya harus dikubur dengan ketidak sadaran rakyat akan akibat transaksi tersebut dan lebih jauhnya akibat bahayanya politik dinasti terhadap negara.

5. Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia

Nur Hidayati dalam jurnalnya yang berjudul *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia* menjelaskan bahwa Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik. Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi. Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistem meritokrasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti.

6. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia

Martien Herna Susanti dalam jurnalnya yang berjudul *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia* menjelaskan bahwa kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi *checks and balances* hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi

7. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal

Wasisto Raharjo Djati dalam jurnalnya yang berjudul *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal* mengemukakan bahwa kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Gejala familisme sebagai preferensi politik

yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia.

8. Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015

Muhammad Fadli, dkk dalam jurnalnya yang berjudul *Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015*, menjelaskan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit politik mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Faktor pendorong lain masyarakat aktif berpartisipasi yaitu (1) diberikan imbalan

materi (2) adanya sentimen keagamaan salah satu pasangan calon terhadap agama (pendeta) dalam kegiatan beribadah.

9. Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017

Rekha Aji Pratama dalam jurnalnya yang berjudul *Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017* menjelaskan bahwa salah satu masalah yang masih terjadi di birokrasi pemerintah daerah adalah patronase dan klientalisme yang masih sering digunakan oleh para politisi untuk melaksanakan agenda tertentu di luar tugas pokok dan fungsi birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk patronase dan klientalisme yang terbentuk dalam hubungan politisi, birokrat dan masyarakat di mana walikota aktif “Asrun” menggunakan aparat birokrasi sebagai mesin politik untuk memenangkan anaknya “AdriatmaDwi Putra” (ADP) sebagai walikota Kendari pada pemilu secara bersamaan pada tahun 2017. Pertama, hubungan yang terbangun di birokrasi meliputi penentuan karir dan jabatan birokrasi di Kendari, bentuk pertamanya dilakukan dalam rangka konsolidasi dukungan dari birokrasi untuk memenangkan ADP. Kedua, hubungan yang dibangun di masyarakat yaitu mobilisasi suara melalui *Vote Buying* dan *Park Barrel*. Bentuk kedua tersebut sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan atau suara dengan cara aparat birokrasi menjadi sosok perantara untuk memobilisasi suara di masyarakat.

10. Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi

Budhi Prianto dalam jurnalnya yang berjudul *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi* menjelaskan bahwa praktek demokrasi dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata dua, yang satu sisinya memberikan hak politik untuk dapat dipilih kepada individu atau kelompok, dan pada sisi yang lain merampas hak politik untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan *necessary condition* bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di Indonesia. Tak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan baik di tubuh partai politik maupun pemerintah daerah tanpa disertai kompetisi yang memadai dalam *governance* pemerintahan di daerah. Akibatnya, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah.

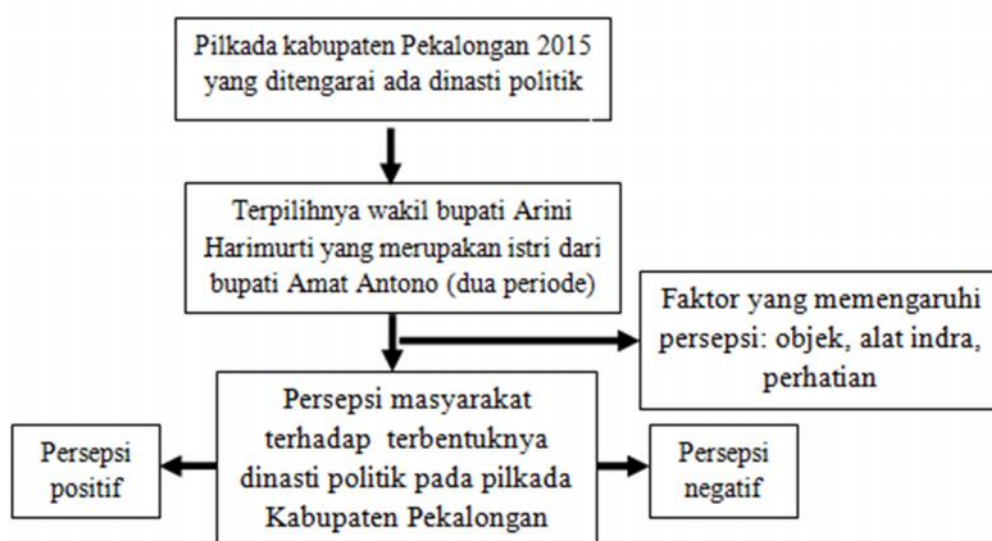
C. Kerangka Berpikir

Pada tahun 2015 terdapat pilkada serentak di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Di antara pilkada serentak yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah dengan pelaksanaan pilkada yang menarik. Hal tersebut dikarenakan pada pilkada ini, istri dari bupati sebelumnya yaitu Drs. H. Amat Antono, M.Si yang telah menjabat dua

periode juga ikut terdaftar sebagai calon wakil bupati yang ikut berkompetisi dalam memenangkan pilkada.

Pemenang dalam pilkada Kabupaten Pekalongan masa jabatan tahun 2016-2021, Ir. Hj. Arini Harimurti atau wakil kepala daerah yang terpilih sebagai pasangan dari H. Asip Kholbihi SH, M.Si adalah istri dari Bupati Kabupaten Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si. Pemilih cenderung memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda satu sama lain. Pandangan para pemilih yang bervariasi tersebut terjadi karena adanya proses persepsi.

Proses persepsi berlangsung karena adanya stimuli yang menerpa seseorang individu melalui panca indera. Namun, tidak semua rangsangan mampu memperoleh perhatian, karena terjadi proses seleksi terhadap rangsangan tersebut. Dalam proses tersebut, seorang dapat memberikan penilaian yang positif atau negatif bergantung dari latar belakang yang dimilikinya



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang persepsi masyarakat tentang terbentuknya dinasti politik dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat Desa Banjarsari Kabupaten Pekalongan terhadap terbentuknya dinasti politik pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015 dapat diketahui melalui enam indikator. *Pertama*, pengetahuan tentang pilkada yang berkaitan dengan nama pasangan calon, visi misi serta partai pendukung didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 70,66%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap pengetahuan tentang pilkada di Kabupaten Pekalongan adalah tinggi. *Kedua*, pengetahuan tentang dinasti politik yang dipahami sebagai kekuasaan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 73,20%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap pengetahuan tentang dinasti politik adalah tinggi. *Ketiga*, dampak dinasti politik berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menurun karena rawan penyalahgunaan kekuasaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 77,18%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat

Desa Banjarsari terhadap dampak dinasti politik di Kabupaten Pekalongan adalah tinggi. *Keempat*, orientasi pemilih cenderung memilih kandidat yang mempunyai sifat dan sikap baik, program kerja bagus, persamaan ideologi, pengalaman dalam bidang pemerintahan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 70,08%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Banjarsari tentang orientasi pemilih adalah tinggi. *Kelima*, elit politik memiliki posisi penting diberbagai sektor kehidupan dan kepentingan untuk mengendalikan kekuasaan didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 74,16%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Banjarsari tentang elit politik pada pilkada Kabupaten Pekalongan adalah tinggi. *Keenam*, jaringan sosial dapat digunakan untuk menjaring dukungan kepada kandidat didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 77,11%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Banjarsari tentang jaringan sosial pada pilkada Kabupaten Pekalongan adalah tinggi.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Banjarsari terhadap terbentuknya dinasti politik pada Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2015 yaitu pengetahuan tentang dinasti politik yang dapat diperoleh melalui alat indera, dan perhatian atau cara pandang masyarakat Desa Banjarsari atas terpilihnya Ir. Hj. Arini Harimurti sebagai wakil bupati.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan diperoleh hasil, maka saran yang diajukan yaitu masyarakat hendaknya melihat dan mencermati kandidat dalam kompetisi pilkada untuk lebih mengenal calon bupati dan wakil bupati sehingga dapat menentukan kriteria pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hikmat, Mahi M. 2013. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Bestari.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Antropologi Budaya*. Jakarta: Endraswara, Suwardi. 2006.
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubarok, Mufti. 2004. *Gerakan Bawah Tanah dan Relasi antar Kelompok*. Surabaya: PT. Java Pustaka Printing.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian: Definisi Perilaku Pemilih dan Perilaku Politik*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP
- Prawiladilaga, Dewi dan Siregar, E. 2004. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predia Media Group
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 2006. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sobur, Alex. 2013. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CAPS

Varma, Sp. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers

Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset

Jurnal:

Amelia, Masda Putri. 2015. *Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo*. *Jurnal Politik Muda* Vol 4, No. 3. Hal. 319-327

Aninda, Resiana Dina. 2013. *Pelanggaran Dinasti Politik 'Samawi' Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul Tahun 2010*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol 3. No 2. Hal. 15-28

Djati, Wasisto Raharjo. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol.18, No. 2, Juli 2013: 203-231

Fadli, Muhammad, Muh Kausar Bailusy dkk. 2018. *Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015*. *Umpo: Sosial Politik Humaniora*. Vol. 6, No.2. Hal 301-328

Hidayati, Nur. 2014. *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia*. Semarang: Orbith. Vol 10. No 1. Hal 18-21

Masitah, Dewi. 2015. *Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015*. Unair: Cisoc Kajian Rumpun Pendidikan Ilmu Sosial. Vol2. No 01. Hal 45-56

Pamungkas, Sigit. 2009. *Hukum-Hukum Perilaku Pemilih di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. April 7. Yogyakarta

Pratama, Rekha Adji. 2017. *Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari tahun 2017*. UGM: *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 2 No. 1. Hal 33-44

- Prianti, Budhy. 2016. *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1, No. 2. Hal 105-117
- Susanti, Martien Herna. 2017. *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. Journal of Government and Civil Society. Vol 1. No 2. Hal 111-119
- Sutisna, Agus. 2017. *Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 2. No 2. Hal 101-120

UNDANG-UNDANG:

- Pemerintahan Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Sekretariat Negara, Jakarta.

Lain-lain:

- KPPS Desa Banjarsari.
KPU Kabupaten Pekalongan